

POLA KEKUATAN PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA DALAM PEMILU DI ERA REFORMASI

Nasuhaidi^a, Dimas Subekti^b

^a Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia Program

^b Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

E-mail: nasuhaidi@unja.ac.id, dimassubekti05@unja.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan pola kekuatan partai politik Islam Indonesia dalam pemilu di era reformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik berbasis nasionalis masih menguasai kekuasaan politik di Indonesia, sementara partai politik berbasis Islam berada di pinggiran. Hal ini disebabkan karena partai Islam sendiri tidak dapat menjamin dan mendukung aspirasi umat Islam. Kemudian, partai-partai politik Islam yang moderat dan adaptif terhadap situasi politik yang lebih terbuka dan penerimaan terhadap negara demokrasi cenderung mendapatkan suara yang stabil dalam pemilu. Sementara itu, partai yang tetap kaku dengan model konservatif dan lebih keras dalam menjalankan strategi dakwah yang menekankan pada interpretasi Islam politik yang ketat cenderung gagal mendapatkan suara dalam pemilu. Selain itu, partai-partai politik Islam masih diperhitungkan dalam membentuk koalisi hanya karena massa pendukung yang mereka miliki. Namun, sejak pemilu 2004, partai-partai politik Islam tidak lagi menjadi pemain utama koalisi. Hal ini disebabkan karena partai politik Islam membutuhkan figur politik yang solid secara ideologis dan elektoral.

Kata Kunci: Partai Politik Islam, Kekuatan, Era Reformasi

PATTERNS OF POWER OF INDONESIAN ISLAMIC POLITICAL PARTIES IN ELECTIONS DURING THE REFORM ERA

ABSTRACT

This research explains patterns of power of Indonesian Islamic political parties in elections during the reform era. This research uses a qualitative method. The findings in this study show that nationalist-based political parties still control political power in Indonesia, while Islamic-based political parties are on the periphery. This is because Islamic parties themselves cannot guarantee and support the aspirations of Muslims. Then, Islamic political parties that are moderate and adaptive to a more open political situation and acceptance of a democratic state tend to get stable votes in elections. Meanwhile, parties that remain rigid with conservative models and are more rigorous in carrying out da'wah strategies emphasizing strict interpretations of political Islam tend to fail to get votes in elections. In addition, Islamic political parties are still taken into account in forming coalitions only because of the mass of supporters they have. However, since the 2004 elections, Islamic political parties have not become the leading coalition players. This is because Islamic political parties need ideologically and electorally solid political figures.

Keywords: Islamic Political Parties, Election, Power, Reform Era

PENDAHULUAN

Partai politik Islam secara historis telah mewarnai perkembangan negara Indonesia. Penentuan nilai-nilai agama dalam dinamika politik merupakan sebuah keniscayaan yang harus terjadi. Agama telah ditetapkan sebagai salah satu variabel penting yang turut menentukan warga negara dalam sebuah panggung politik (Jung 2014). Agama sebagai sub-sistem politik harus memiliki syarat untuk keberlangsungannya dari waktu ke waktu. Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki kepastian untuk berasimilasi dengan tahapan perubahan eksistensi manusia, yang membuatnya tetap memiliki daya tarik yang kuat di setiap abad (Mikail 2015). Para pemikir politik Islam pada umumnya menekankan pentingnya nilai-nilai agama Islam dalam menjiwai sistem pemerintahan. Mereka tidak memisahkan agama dari negara seperti yang dilakukan oleh para pemikir Barat (sekuler) (Bulliet et al. 2013; Rane 2013).

Keberadaan partai-partai Islam di Indonesia merupakan salah satu sarana moderasi umat Islam yang dapat meredam cita-cita negara Islam dan lebih jauh lagi dapat meredam paham-paham radikal. Melalui partai-partai Islam, semangat bernegara dari kaum Islamis dapat disalurkan secara proporsional dan bertanggung jawab. Umat Islam tidak bisa serta merta mengejar tujuan penerapan Syariah melalui revolusi atau kudeta, melainkan melalui objektifikasi, rasionalisasi, dan marketisasi substansi Syariah melalui jalur demokratis (Fossati 2019; Zulifan 2019). Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilihan umum langsung setelah era orde baru dan memasuki era reformasi: 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Partai-partai politik Islam selalu berpartisipasi dalam pemilu-pemilu tersebut. Pada pemilu 1999, terdapat sembilan partai politik Islam; pada pemilu 2004, enam partai politik Islam berpartisipasi, dan pada pemilu 2009. Pada Pemilu 2014, lima partai politik Islam berpartisipasi dalam pemungutan suara, dan kemudian pada Pemilu 2019, hanya ada empat partai politik (KPU RI 2023). Lebih lanjut, dari keempat pemilu tersebut, partai politik Islam yang secara konsisten lolos ke

parlemen adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, keempat partai politik Islam tersebut tidak dapat memenangkan pemilu melainkan sebatas mendapatkan suara menengah atau terakhir (Zulifan 2019). Jadi, dapat dijelaskan bahwa partai politik Islam belum memiliki kekuatan yang besar dalam memenangkan pemilu berdasarkan lima edisi pemilu Indonesia di era reformasi. Masyarakat Indonesia yang 85% beragama Islam, namun faktanya tidak berkorelasi positif dengan tingkat keterpilihan partai-partai Islam.

Kemudian, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan yang membahas topik partai politik Islam. Penelitian dari (Saputro et al. 2023) menjelaskan tentang penggunaan media sosial oleh partai politik Islam untuk mendapatkan suara dari Generasi Z dan milenial. Penelitiannya menemukan bahwa mendapatkan suara dari generasi muda tidaklah mudah karena generasi ini relatif alergi dengan partai politik. Generasi ini kurang ideologis dan kritis, sehingga partai akan lebih mudah mendapatkan suara dari generasi ini. Selanjutnya, penelitian dari (Argenti 2022) apakah partai-partai Islam mempertahankan Post-Islamisme dalam program politiknya pada pemilu 2019. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa partai-partai Islam secara konsisten menggunakan pendekatan Post-Islamisme pada Pemilu 2019, meskipun perolehan suara mereka stagnan sebagai partai papan tengah.

Sementara itu, penelitian (Chalik 2021) menjelaskan tentang dinamika politik koalisi di kalangan partai politik Islam. Studinya menemukan bahwa bagi partai-partai Islam di Indonesia, koalisi kompromi merupakan pilihan yang paling rasional karena adanya peluang untuk membentuk koalisi koalisi ideologis. Namun, ada kemungkinan terjadinya koalisi ideologis di masa depan, bahkan dalam skala yang lebih kecil, di tingkat lokal. Sementara itu, koalisi ideologis sudah kehilangan momentumnya di tingkat nasional kecuali ada momentum baru yang sama kuatnya dengan momentum di awal reformasi. Adapun saat ini, partai-partai Islam sudah berada pada posisi yang nyaman ketika

berada dalam satu perahu besar dengan partai-partai lain. Selain itu, penelitian dari (Noor 2016) menjelaskan respon Masyumi terhadap pluralisme, terutama terkait politik keberagaman dalam lima belas tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dan sikap Masyumi terkait politik keberagaman menunjukkan posisinya yang tepat terhadap pluralisme politik. Meskipun terdapat dukungan yang lemah terhadap semangat keberagaman, terutama dari kelompok-kelompok komunis, Masyumi terbukti menjadi elemen penting dalam sejarah politik Indonesia dengan berbagai cara dalam membangun dan mempertahankan semangat pluralisme.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih banyak membahas mengenai penggunaan media sosial, program politik, dinamika koalisi, dan respon terhadap pluralisme. Namun, penelitian harus secara komprehensif menjelaskan pola kekuatan politik Islam dalam pemilu. Oleh karena itu, kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah fokus membahas pola kekuatan politik Islam melalui partai politik dalam pemilu di Indonesia pada era reformasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi pola kekuatan politik Islam di Indonesia pada era reformasi melalui partai politik dalam pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dari penelitian ini adalah partai-partai politik Islam Indonesia yang berpartisipasi dalam pemilihan umum 2004, 2009, 2014, dan 2019. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data penelitian ini dari media daring yang memiliki reputasi dan kredibilitas seperti kompas.com, CNN Indonesia, tempo.com, liputan6.com, dan detiknews.com serta artikel jurnal yang relevan.

Teknik analisis data dari penelitian ini adalah deskriptif. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar variabel, verifikasi data, interpretasi, dan

penarikan kesimpulan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perangkat NVIVO 12 plus dalam menganalisis data dari berita online tersebut. Penggunaan perangkat lunak NVIVO 12 plus dalam penelitian ilmiah bertujuan untuk menganalisis data secara efektif yang kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar yang menarik sehingga dapat diinterpretasikan dengan mudah oleh penulis dan dibaca dengan menarik oleh pembaca (Edhlund and McDougall 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Partai Politik Islam dalam Partisipasinya di Pemilu Era Reformasi

Diskusi mengenai partai Islam saat ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik umat Islam di Indonesia, terutama setelah reformasi. Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 memberikan harapan baru bagi umat Islam Indonesia untuk mendapatkan ruang politik yang lebih baik (Hadiz 2011). Di era Habibie yang menggantikan Soeharto, umat Islam berusaha memaksimalkan kondisi sosial-politik yang ada. Pada saat yang sama, Habibie mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik yang mendukung transisi demokrasi di Indonesia. Habibie memberikan kontribusi yang signifikan terhadap liberalisasi politik. Hal ini dapat dilihat dari pendekatannya dalam memberikan kebebasan kepada para tahanan politik, mengatur kebebasan pers, menghapuskan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal, dan mengakhiri pembatasan jumlah partai politik (Fanani 2014). Kebijakan politik ini tentu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika politik dan mempengaruhi peran umat Islam dalam kancah perpolitikan di Indonesia.

Partai-partai Islam pasca reformasi tumbuh bak jamur di musim hujan dan optimis akan memenangkan Pemilu 1999. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hasil yang sebaliknya. Dari 21 partai Islam yang lolos dalam pemilu, hanya sepuluh partai yang memperoleh setidaknya satu atau lebih kursi di parlemen. Partai-partai Islam memperoleh 37% suara atau 172 kursi di DPR. Perinciannya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (58 kursi), Partai Keadilan Bangsa (PKB) (51 kursi), Partai

Amanat Nasional (PAN) (34 kursi), Partai Bulan Bintang (PBB) (13 kursi), Partai Keadilan (PK) (7 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (PNU) (5 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (PP) (1 kursi), Partai Islam Indonesia Masyumi (1 kursi), dan Partai Kebangkitan Umat (PKU) (1 kursi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, partai-partai Islam tidak mendapatkan dukungan yang signifikan dari konstituen Islam (Porter 2004). Sebaliknya, partai-partai nasionalis, yang tidak diperkirakan akan mendapatkan banyak suara, malah mendapatkan dukungan yang signifikan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 33,7% suara, atau 154 kursi. Partai Golkar, yang sebelumnya diperkirakan akan mengalami kekalahan telak, berhasil memperoleh 22,4% suara atau 120 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Fanani 2013).

Kegagalan partai-partai Islam untuk memenangkan pemilihan umum pertama di era reformasi sangat berdampak pada para pemimpin partai-partai Islam. Harapan mereka untuk memegang kepemimpinan nasional sulit dicapai. Terjadi demoralisasi di tubuh partai-partai Islam setelah pemilu 1999. Namun, kondisi ini hanya berlangsung singkat, karena partai-partai Islam sepakat untuk berkoalisi dengan mengambil momentum polarisasi dukungan politik pemilihan Presiden antara Habibie (Partai Golkar) dan Megawati (PDIP). Dengan membuat Poros Tengah, mereka memainkan isu dan kartu Islam dengan mengusung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Calon Presiden alternatif. Setelah melalui berbagai lika-liku politik dan dinamika politik yang menarik, dan setelah MPR menolak Pidato Pertanggungjawaban Habibie, Gus Dur terpilih menjadi Presiden ke-4 Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1999 (M Mietzner 2013; Romano 2013). Sebelumnya, Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua DPR dan M. Amien Rais terpilih sebagai Ketua MPR. Ketika Gus Dur terpilih sebagai Presiden, gema takbir dan shalawat badar terdengar di MPR (Kersten 2017). Saat itu, banyak yang menyebutnya sebagai kemenangan Islam dan era pemerintahan Indonesia yang dipegang oleh

kaum santri. Era santri berkuasa memberikan harapan baru bagi partai-partai Islam untuk berpartisipasi dan memiliki masa depan politik yang cerah di Indonesia.

Era kejayaan partai-partai Islam di panggung kekuasaan tidak berlangsung lama. Tak lama setelah Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, terjadi konflik antara tokoh-tokoh Islam dengan partai-partai Islam itu sendiri. Setelah konflik semakin memanas dan tidak dapat didamaikan, Gus Dur akhirnya dimakzulkan oleh MPR melalui Sidang Istimewa pada tahun 2001. Gerakan pemakzulan terhadap Gus Dur dilakukan oleh koalisi Poros Tengah minus PKB, bersama PDI-P dan Partai Golkar. Memang, naik dan turunnya Gus Dur disponsori oleh partai-partai Islam dan organisasi Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (Künkler and Stepan 2013; Menchik 2016). Naiknya Megawati sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia dengan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden menunjukkan keberhasilan kembalinya partai Islam ke panggung politik nasional. Seperti yang dinyatakan oleh Rizal Sukma, fakta politik ini menunjukkan bahwa Islam telah memainkan peran penting dalam sistem politik dan suksesi di Indonesia pasca-Soeharto. Islam politik juga semakin diperhitungkan di panggung politik nasional (Umar 2016).

Dinamika eksistensi partai politik Islam dalam pentas sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika politik yang tidak stabil. Hal ini tidak terlepas dari kemajemukan masyarakat Indonesia yang tidak hanya berisikan umat Islam saja, melainkan majemuk dengan keberagaman agama lainnya. Dinamika tersebut dapat dilihat dari rekam jejak partisipasi partai politik Islam dalam pemilihan umum di Indonesia. Perolehan suara partai politik Islam yang cenderung menurun sejak era reformasi menjadi catatan dan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Banyak faktor yang tentunya menjadi penyebab kecilnya perolehan suara partai politik Islam. Karakteristik dan ideologi partai menjadi taruhan dalam penilaian masyarakat terhadap eksistensi partai politik Islam (Triono 2015).

Tabel 1. Perolehan suara partai-partai politik Islam dalam pemilihan umum di Indonesia

Pemilu	Partai-partai politik Islam yang berpartisipasi dalam pemilu	Status di Parlemen	Suara dan kursi	Jumlah
2004	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Lolos	Suara: 11.989.564 (10,56 %) Kursi: 52	Suara: 40.742.760 (38.3%) Kursi: 166
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Lolos	Suara: 8.325.020 (7,34%) Kursi: 45	
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP),	Lolos	Suara: 9.248.764 (8,15 %) Kursi: 58	
	Partai Amanat Nasional (PAN)	Lolos	Suara: 7.313.305 (6,44%) Kursi: 53	
	Partai Persatuan Nahdlatul Ulama.	Tidak Lolos	Suara: 895.620 (0,79%) Kursi: 0	
	Partai Bulan Bintang (PBB)	Lolos	Suara: 2.970.487 (2,62%) Kursi: 11	
2009	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Lolos	Suara: 5.146.122 (4,94%) Kursi: 28	Suara: 28.533.216 (29.2%) Kursi: 169
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Lolos	Suara: 8.206.955 (7,88%) Kursi: 57	
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP),	Lolos	Suara: 5.533.214 (5,32 %) Kursi: 38	
	Partai Amanat Nasional (PAN)	Lolos	Suara: 6.254.580 (6,01 %) Kursi: 46	
	Partai Persatuan Nahdlatul Ulama.	Tidak Lolos	Suara: 1.527.593 (1,47%) Kursi: 0	
	Partai Bulan Bintang (PBB)	Tidak Lolos	Suara: 1.864.752 (1,79%) Kursi: 0	
2014	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Lolos	Suara: 11.298.957 (9,04 %) Kursi: 47	Suara: 39.244.020 (31.4%) Kursi: 175
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Lolos	Suara: 8.480.204 (6,79 %) Kursi: 40	
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP),	Lolos	Suara: 8.157.488 (6,53%) Kursi: 39	
	Partai Amanat Nasional (PAN)	Lolos	Suara: 9.481.621 (7,59 %) Kursi: 49	
	Partai Bulan Bintang (PBB)	Tidak Lolos	Suara: 1.825.750 (1,46%) Kursi: 0	
2019	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Lolos	Suara: 13.570.970 (9,69 %) Kursi: 58	Suara: 40.960.403 (29,26 %) Kursi: 171
	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Lolos	Suara: 11.493.663 (8,21 %) Kursi: 50	
	Partai Persatuan Pembangunan (PPP),	Lolos	Suara: 6.323.147 (4,52 %) Kursi: 19	
	Partai Amanat Nasional (PAN)	Lolos	Suara: 9.572.623 (6,84 %) Kursi: 44	

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, (2023)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dari pemilu ke pemilu, dukungan publik terhadap partai-partai Islam mengalami fluktuasi yang dibuktikan dengan persentase perolehan suara pada setiap pemilu: 1999 (36,7%), 2004 (38,3%), 2009 (29,2%), 2014 (31,4%), dan 2019 (29,26%). Meskipun ada lebih banyak pemilu, termasuk pada tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014, pertumbuhannya tidak signifikan; bahkan, perolehan suara pada Pemilu 1955 masih jauh dari Partai Islam Masyumi (43,5%) (Argenti 2022). Ada tiga faktor yang melemahkan dukungan publik terhadap partai-partai Islam, yaitu pertama, masyarakat Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai komitmen kebangsaan bersama. Kedua, perpecahan politik internal di tubuh umat Islam sehingga sinergi gerakan tidak optimal. Ketiga, ketidakmampuan partai-partai Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah riil yang terjadi di masyarakat, seperti masalah kemiskinan dan pengangguran.

Oleh karena itu, partai-partai Islam harus memahami budaya politik di masyarakat Indonesia dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat (Yumitro 2014). Lebih dari itu, perolehan suara partai politik dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh perilaku pemilih. Ada pemilih yang konsisten memilih partai politik tertentu di setiap pemilu, dan ada pula yang tidak konsisten sehingga memilih partai yang berbeda di setiap pemilu. Sikap dan perilaku pemilih tipe pertama tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai isu yang muncul menjelang pemilu. Sebaliknya, pemilih tipe kedua rentan terhadap pengaruh isu-isu yang berkembang menjelang pemilu. Jika banyak pemilih tipe kedua dalam suatu pemilu, maka suara partai akan sangat berfluktuasi (Guardado and Wantchekon 2018).

Kemudian, jumlah umat Islam yang besar belum tentu memiliki pemikiran yang seragam. Sebaliknya, justru jumlah yang besar itulah yang menyebabkan heterogenitas di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa perbedaan budaya, pendidikan agama, konteks, sosial-politik, dan realitas yang mereka hadapi di masing-masing daerah (Al Qurtuby 2020; Barkin 2014). Para akademisi partai politik peserta FGD

menjelaskan bahwa polarisasi di kalangan Islam politik yang terjadi perlu menjadi perhatian bagi Islam politik, yaitu para elit partai politik, untuk membangun kekuatan politik yang efektif untuk menghasilkan kebijakan politik yang strategis. Prosedur strategis yang dimaksud memungkinkan terjadinya perubahan kondisi masyarakat di tingkat nasional dan lokal. Untuk mewujudkan agenda tersebut, diperlukan pemahaman yang sama dalam memandang kondisi politik saat ini, mengingat keberadaan partai berbasis Islam banyak dikritik.

Berbagai konflik di tubuh partai berbasis Islam, seperti yang dialami PPP, PKB, dan lainnya, menghambat terbangunnya kekuatan politik yang signifikan. Tergerusnya dukungan publik terhadap partai-partai berbasis Islam tentu menjadi motivasi bagi partai-partai berbasis Islam untuk berbenah diri, termasuk kerja sama politik di antara partai-partai tersebut (Tanuwidjaja 2010). Faktor-faktor yang melatarbelakangi tergerusnya dukungan masyarakat tersebut adalah; pertama, masyarakat perlu memahami bahwa memilih partai Islam adalah kewajiban agama. Kedua, partai-partai Islam tidak memberikan tampilan yang sama dalam perjuangannya. Ketiga, adanya pemahaman bahwa pemilu adalah sistem kafir, sehingga ikut serta dalam pemilu adalah haram. Keempat, partai non-Islam berpenampilan islami, terutama dalam hal ritual dan amal sosial. Kelima, sinergisme dan 'efek bola salju' antara ideologi umat dan kekuasaan sekuler menjadi masalah bagi partai politik Islam (T. J. Waluyo 2021).

Hal ini juga sejalan dengan apa yang ada dalam penelitian (Aspinall and Mietzner 2019) yang menjelaskan bahwa terdapat masalah internal dan eksternal partai politik Islam yang membuat mereka tidak bisa eksis dalam keikutsertaannya di pemilu. Faktor internal yang dimaksud adalah partai itu sendiri yang tidak dapat menjamin dan mendukung aspirasi umat Islam. Ketidakmampuan melayani umat mengurangi kepercayaan untuk memilih partai Islam meskipun partai tersebut telah mengadopsi Islam sebagai haluannya. Sementara itu, faktor eksternal adalah masyarakat Indonesia saat ini kurang memiliki pengetahuan yang

dapat mendorong dan menarik minat mereka untuk memilih partai berbasis Islam. Selain itu, ideologi-ideologi asing sudah mulai menginvasi pemikiran umat Islam. Ideologi-ideologi Barat seperti kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme secara brutal merasuk ke dalam pemikiran umat Islam, dan tanpa mengkritisi, umat Islam langsung menerima dan menjadi ideologi berbangsa dan bernegara sehingga keberpihakan kepada partai-partai Islam menjadi sangat minim dan bertolak belakang.

Faktor lain yang menyebabkan perolehan suara partai politik berbasis massa Islam terus merosot sejak Pemilu 1999 adalah: Pertama, partai-partai Islam kurang mengoptimalkan nilai diferensiasi yang dimiliki di tengah pasar pemilih, kecenderungan yang terjadi saat ini adalah partai-partai politik berbasis massa Islam dianggap gagal berfungsi di tengah konstituen. Kedua, partai-partai Islam perlu mengelola ekspektasi publik. Ego sektoral yang ditunjukkan oleh partai politik berbasis massa Islam membuat mereka enggan melakukan komunikasi politik antar partai politik Islam. Komunikasi lintas parpol diperlukan untuk membangun kekuatan yang nyata. Keempat, fenomena "Islam Yes, Partai Islam No" yang semakin kental mengindikasikan bahwa mayoritas Islam di Indonesia tidak menghendaki partai yang beraroma Islam menjadi mayoritas. Kelima, pendanaan politik partai-partai Nasionalis lebih besar daripada pendanaan politik partai-partai Islam. Keenam, munculnya anarkisme yang mengatasnamakan Islam oleh kelompok tertentu dinilai berdampak pada munculnya "kecemasan kolektif" di masyarakat secara umum (Pepinsky, Liddle, and Mujani 2012; Zarkasyi 2008). Faktor lainnya adalah partai-partai nasionalis mengakomodasi banyak tokoh Islam ke dalam struktur partai dan dalam perekrutan anggota parlemen. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sekarang lebih realistis dalam menentukan pilihan mereka. Banyak yang sudah muak dengan sikap dan tindakan anarkis kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan dan mempromosikan simbol-simbol Islam, yang oleh survei digambarkan sebagai kecemasan kolektif (Henderson and Kuncoro 2011)

Keberadaan partai politik tidak hanya dalam perolehan suara dalam pemilihan umum. Lebih dari itu, partai politik memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis. Mewujudkan kondisi ideal partai politik tentu membutuhkan manajemen organisasi yang efektif, dalam hal ini divisi yang terkonsentrasi pada kajian berbagai isu, kajian, evaluasi, proyeksi, dan inovasi agar partai politik dapat menghasilkan produk politik yang berkualitas. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi eksistensi partai politik tersebut. Hadirnya karakteristik yang menjadi ciri khas partai politik Islam bawah tanah menjadi catatan menarik bahwa umat Islam selama ini belum mampu bersatu dalam perjuangan politik yang lebih luas (Latief 2013; Miichi 2015). Tantangan berat pasca Pemilu 2014 yang dihadapi partai politik Islam adalah bagaimana meningkatkan kerja-kerja nyata dengan ciri khas nilai-nilai keislaman sebagai agenda dalam memperjuangkan kemaslahatan umat. Selain itu, mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk tetap eksis dalam memimpin negeri. Fenomena persaingan yang muncul pada Pemilu 2009 dan berlanjut pada Pemilu 2014 semakin terlihat. Oleh karena itu, mengkaji partai politik yang bermain di dalamnya masih menarik untuk dikaji dan diperdebatkan (Liddle and Mujani 2013; Van Bruinessen 2013).

Dengan demikian, seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar politik, partai politik berbasis nasionalis masih menguasai pusat kekuasaan politik di Indonesia, dan partai politik berbasis Islam berada di pinggiran. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi para tokoh Islam yang aktif di partai politik berbasis Islam untuk mengubah citra politik yang dapat membuat masyarakat lebih nyaman dan tidak terlalu cemas. Partai politik Islam harus mampu menyikapi implementasi penerapan demokrasi kebebasan dalam langkah dan gerak kehidupan politik ormas-ormas Islam. Inilah yang dimaksud dengan memperbaiki kebutuhan strategi programnya.

Daya Tawar Partai Politik Islam dalam Membangun Koalisi

Studi tentang koalisi sendiri sebenarnya terinspirasi dari "teori permainan", "teori

spasial", dan kompetisi elektoral, yaitu bagaimana partai politik dan para elitnya sebagai aktor rasional berkompetisi dan berusaha memaksimalkan posisinya untuk meraih kekuasaan di pemerintahan (Mair 2008). Lebih lanjut, kita dapat memahami koalisi sebagai penggunaan sumber daya bersama untuk menentukan hasil dari situasi dengan motif beragam yang melibatkan lebih dari dua unit (Musella 2018; Musella and Musella 2018). Dalam sistem multipartai seperti di Indonesia, kekuatan politik umumnya terdistribusi di antara beberapa partai, sehingga kebutuhan untuk membangun koalisi menjadi tidak terhindarkan. Sistem multipartai ini membutuhkan dukungan yang cukup untuk Presiden di legislatif dan memperkuat serta meningkatkan kualitas kinerja pemerintah (Aytaç 2014; Marcus Mietzner 2016).

Konfigurasi perolehan suara partai-partai Islam dan partai-partai nasionalis-sekuler pada pemilu 1999 hingga 2014 menghadirkan drama politik yang terjadi pada saat pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 1999, di tengah persaingan partai politik dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden, muncul koalisi partai-partai Islam yang kemudian disebut sebagai Koalisi Poros Tengah. Saat itu, Amien Rais yang dikenal sebagai lokomotif reformasi menguat untuk dicalonkan sebagai Presiden. Namun kalkulasi politik Amien Rais yang tidak ingin maju dalam bursa calon presiden memunculkan nama Abdurrahman Wahid (sekarang Gus Dur) sebagai calon presiden untuk menghadang Megawati yang diusung PDIP. Berdasarkan Sidang Istimewa MPR yang diadakan secara tertutup, Abdurrahman Wahid memperoleh 373 suara, sedangkan Megawati Soekarnoputri memperoleh 313 suara. Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia berdasarkan suara tersebut. Sejarah tahun 1999 juga menunjukkan drama pemilihan calon wakil presiden. Ketika Koalisi Poros Tengah mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden dan akhirnya terwujud, pemilihan wakil presiden dilakukan secara terpisah. Meskipun partai-partai Islam mendukung Poros Tengah, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Megawati yang berasal dari PDIP dan dikenal

sebagai partai nasionalis-sekuler mampu mengalahkan Hamzah Haz dengan perolehan suara 396 untuk Megawati dan 284 untuk Hamzah (Ekawati 2015). Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati sebagai wakilnya merupakan sebuah fakta bahwa demokrasi bukanlah sistem yang sempurna untuk memilih pemimpin, tetapi merupakan cara yang paling memungkinkan untuk menengahi pertarungan dan konflik elit politik yang terjadi saat itu (Mujani, Liddle, and Ambardi 2018).

Pemilu 2004 menggambarkan peta politik partai-partai Islam yang tidak lagi bersatu dan cenderung memilih berkoalisi dengan partai-partai sekuler. Lima pasangan calon mengikuti putaran pertama Pilpres 2004. Dari kalangan Islam, Salahuddin Wahid didukung oleh PKB, PDIP mendukung Hasyim Muzadi karena berpasangan dengan Megawati, Amien Rais mendapat dukungan dari PAN, PBR, dan PKS. Sebaliknya, Hamzah Haz mendapat dukungan dari PPP. PBB mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla. Hasil pemilihan putaran pertama tidak dapat menghasilkan suara mayoritas, sehingga pemilihan presiden dilanjutkan dengan putaran kedua yang akhirnya mengukuhkan kemenangan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (Ekawati 2015).

Partai-partai Islam yang awalnya terpecah selama putaran pertama pilpres, mulai bergabung dengan kedua kubu kandidat pada putaran kedua. PPP dan PKB bergabung dengan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi, sementara PAN dan PKS bergabung dengan pasangan Susilo Bambang Yudoyono-Jusuf Kalla. Pada pemilihan presiden 2009, partai-partai Islam kembali bersatu untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono yang kini berpasangan dengan Boediono. Hasilnya, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II masih diwarnai dengan kabinet yang diisi oleh koalisi partai-partai politik pendukung pemerintah. Besarnya koalisi dalam KIB Jilid II ini tentu bukan tanpa alasan. Bagi partai-partai pendukung pemerintah, termasuk partai Islam, koalisi bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup partai secara kolektif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Katz dan Mair bahwa

partai politik menjadi agen negara dan menggunakan sumber daya yang dimiliki negara untuk memenuhi kepentingan kolektif partai (Metz and Várnagy 2021). Partai membangun koalisi untuk memaksimalkan kekuasaan atau yang disebut Riker sebagai office-seeking (Debus and Gross 2016). Sedangkan bagi partai pemerintah, dalam hal ini Partai Demokrat, koalisi yang besar menjadi kekuatan untuk melawan oposisi di parlemen dalam hal pengambilan keputusan.

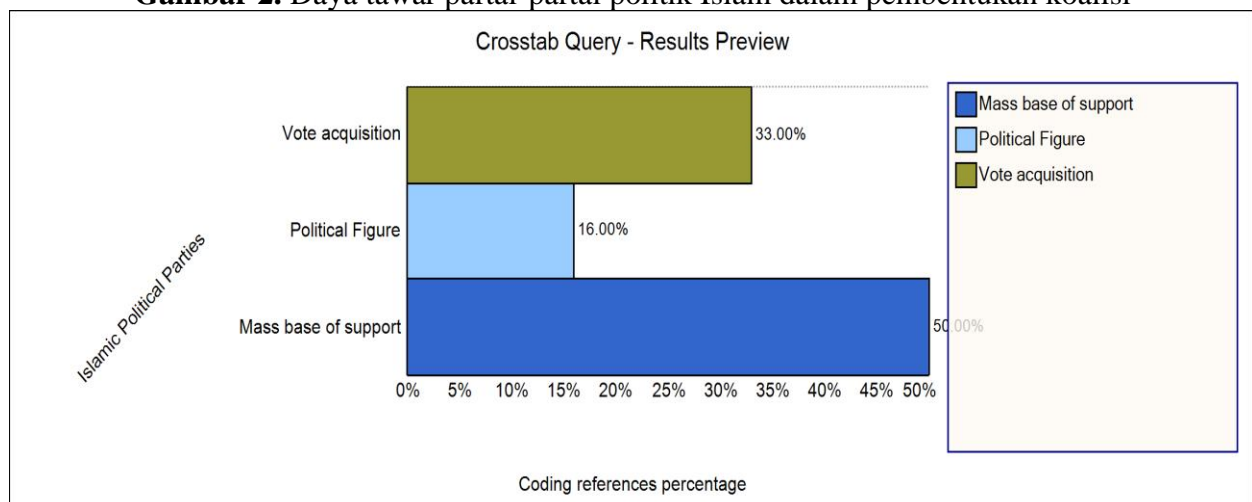
Drama koalisi partai politik berlanjut pada Pemilu 2014 sebelum pemilu legislatif dilaksanakan pada 9 April 2014. Berdasarkan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014, partai-partai Islam memperoleh suara yang signifikan, bahkan PKB menunjukkan peningkatan suara dibandingkan Pemilu 2009. Begitu juga dengan PKS, meski diterpa badai korupsi di tubuh partai, loyalitas pemilih tidak serta merta menggerus suara partai. Hal ini kemudian memunculkan wacana untuk menyatukan partai-partai Islam, bahkan upaya tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan antar elit partai Islam. Memori tahun 1999, ketika koalisi partai-partai Islam melalui "Poros Tengah" berhasil mengalahkan partai-partai nasionalis-sekuler, seakan ingin terulang kembali (Ekawati 2015).

Namun, tidak semua partai Islam bersedia bergabung dengan Poros Tengah. PKB, yang memperoleh suara terbanyak, adalah yang paling keras menolak rencana koalisi tersebut. Hasil pemilu menggambarkan tiga kekuatan yang signifikan: PDIP sebagai pemenang, diikuti oleh Golkar dan Gerindra. Joko Widodo, Aburizal Bakrie, dan Prabowo Subianto diunggulkan sebagai calon presiden

dari ketiga partai ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika partai-partai lain menjajaki koalisi dengan tiga poros signifikan ini, termasuk Partai Islam. PKB sedang menjalin komunikasi dengan PDIP. PPP dan PAN menjajaki aliansi dengan Gerindra, sementara PKS lebih dekat dengan Golkar. Ketiga poros koalisi ini didasarkan pada perolehan suara partai-partai dengan tiga kekuatan terbesar dalam pemilu legislatif 2014 (Ekawati 2019).

Wacana pembentukan koalisi Poros Tengah jilid II kandas karena pada akhirnya hanya ada dua poros yang menjadi kontestan Pilpres 2014, yaitu poros Gerindra dengan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajassa sebagai capres-cawapres dan poros PDIP dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Polarisasi ini menyebabkan partai-partai Islam terpecah ke dalam dua koalisi yang akhirnya terbentuk. PAN, PPP, PKS, dan PBB bergabung dengan Poros Gerindra, sementara PKB tetap bersama PDIP. Bahkan organisasi atau tokoh-tokoh Islam yang seharusnya menjadi penengah justru terjebak dalam pusaran konflik. Bahkan para pemimpinnya pun terpecah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mendukung Prabowo, sementara Hasyim Muzadi mengisyaratkan dukungan untuk Jokowi. Hal yang sama berlaku untuk para ulama dan kyai di masing-masing pasangan calon presiden. Gambar 2 menunjukkan kekuatan tawar-menawar partai politik Islam dalam membentuk koalisi partai politik dalam pemilu.

Gambar 2. Daya tawar partai-partai politik Islam dalam pembentukan koalisi



Gambar 2 menunjukkan bahwa sejak pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, partai-partai politik Islam memiliki daya tawar dengan basis massa pendukung yang menjadi acuan ditambah dengan perolehan suara pada pemilu sebelumnya. Sementara itu, titik lemah partai politik Islam adalah figur politik yang mulai tidak terlihat sejak era Gus Dur. Pemilu merupakan agenda politik partai politik untuk menempatkan kandidatnya di kursi parlemen. Perolehan suara pemilu juga berdampak pada kemungkinan partai politik untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketokohan seseorang menjadi faktor yang harus diperhatikan karena terkait dengan perhitungan probabilitas kemenangan calon yang diajukan oleh partai politik (Sakai and Fauzia 2014). Hasil pemilu legislatif 2014 memunculkan konfigurasi politik yang cukup berbeda dengan dua pemilu sebelumnya, di mana PDI-P memperoleh suara paling signifikan, dan yang cukup menjadi perhatian adalah perolehan suara akumulatif partai-partai Islam yang mencapai hampir 30%. Jika partai-partai Islam berkoalisi, mereka dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri (Ekawati 2019).

Meskipun wacana koalisi pasca-Pemilu Legislatif mengemuka, realitas berbicara lain. Masing-masing partai politik Islam memilih jalur komunikasi politik dengan partai nasionalis. Berbagai opini pun muncul di masyarakat bahwa sikap politik partai-partai Islam yang gagal berkoalisi dikarenakan tidak adanya tokoh/figur partai yang memiliki elektabilitas tinggi jika dibandingkan dengan dua kandidat kuat seperti Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Menjelang pemilihan presiden, Majelis Ulama Indonesia dan Forum Ukhuwah Islamiyah, dalam pertemuannya, menghimbau agar partai-partai politik peserta pemilu 2014 yang berbasis massa Islam untuk berkoalisi dalam pemilihan presiden, namun koalisi tersebut tidak terjadi. Hal ini disebabkan oleh kalkulasi politik dimana kecil kemungkinan terjadinya aliansi partai-partai berbasis massa Islam karena tidak adanya figur pemersatu dan kurang solidnya partai-partai Islam.

Menurut Syamsuddin Haris, peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI), kendala utama koalisi partai-partai Islam pada Pemilu 2014 adalah kebutuhan akan figur. Hal senada diungkapkan Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana, "Soal modal suara, jumlah modal suara yang bisa dikumpulkan memang mencukupi untuk membentuk poros koalisi. Tapi mereka kesulitan mencari figur pemersatu. Kedua, secara historis mereka memiliki hubungan yang tidak harmonis antara satu partai dengan partai lainnya, sehingga poros koalisi baru yang dibangun berdasarkan sentimen Islam sulit untuk direalisasikan." (A. Waluyo 2014).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partai-partai politik berbasis nasionalis masih menguasai kekuasaan politik di Indonesia, dan partai-partai politik berbasis Islam berada di pinggiran. Hal ini disebabkan oleh partai-partai Islam yang tidak dapat menjamin dan mendukung aspirasi umat Islam. Ketidakmampuan melayani umat mengurangi kepercayaan untuk memilih partai Islam meskipun partai tersebut telah mengadopsi Islam sebagai haluan. Apalagi genealogi pemikiran Islam dalam partai-partai politik berbasis Islam di Indonesia menunjukkan bahwa unsur yang dominan adalah pemikiran politik Islam yang moderat dan adaptif terhadap situasi politik yang lebih terbuka dan penerimaan terhadap negara demokrasi yang cenderung mendapatkan suara stabil dalam pemilu. Sementara itu, partai yang tetap kaku dengan model konservatif dan lebih keras dalam menjalankan strategi dakwah yang mengedepankan interpretasi Islam politik yang ketat cenderung gagal mendapatkan suara dalam pemilu.

Kemudian, dalam membentuk koalisi di pemilu, partai politik Islam masih agak diperhitungkan dengan alasan basis massa pendukung. Namun, sejak Pemilu 2004, partai politik Islam tidak menjadi pemain utama koalisi. Hal ini disebabkan karena partai politik Islam membutuhkan figur politik yang solid secara alamiah dan elektoral. Dalam membentuk koalisi, semua partai politik memiliki orientasi kemenangan yang lebih

kuat daripada orientasi ideologi dan kebijakan. Menghitung seberapa besar sumber daya kekuasaan yang dimiliki dan seberapa besar kekuasaan yang akan diperoleh lebih dominan daripada ideologi dan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtuby, Sumanto. 2020. The Rise of Islamism and the Future of Indonesian Islam. *Journal of International Studies (Malaysia)* 16:105–128. doi:10.32890/jis2020.16.7.
- Argenti, Gili. 2022. Post-Islamism in Indonesia : Analysis of Islamic Political Party Programs in the 2019 National Elections. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 11 (1):127–136.
- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. 2019. Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55 (3):295–317. doi:https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412.
- Aytaç, S Erdem. 2014. Distributive Politics in a Multiparty System: The Conditional Cash Transfer Program in Turkey. *Comparative Political Studies* 47 (9). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA:1211–1237. doi:https://doi.org/10.1177/0010414013495357.
- Barkin, Gareth. 2014. Commercial Islam in Indonesia: How Television Producers Mediate Religiosity among National Audiences. *International Journal of Asian Studies* 11 (1). Cambridge University Press:1–24. doi:https://doi.org/10.1017/S1479591413000181.
- Bulliet, Richard, David Cook, Roxanne L Euben, Khaled Fahmy, Frank Griffel, Bernard Haykel, Robert W Hefner, Timur Kuran, Jane McAuliffe, and Ebrahim Moosa. 2013. *The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought*. Princeton University Press.
- Chalik, Abdul. 2021. The Half-Hearted Compromise within Indonesian Politics : The Dynamics of Political Coalition among Islamic Political Parties (1999-2019). *Journal of Indonesian Islam* 15 (02):487–514. doi:10.15642/JIIS.2021.15.2.487-514.
- Debus, Marc, and Martin Gross. 2016. Coalition Formation at the Local Level: Institutional Constraints, Party Policy Conflict, and Office-Seeking Political Parties. *Party Politics* 22 (6). SAGE Publications Sage UK: London, England:835–846. doi:https://doi.org/10.1177/1354068815576292.
- Edlund, Bengt, and Allan McDougall. 2018. *NVivo 12 Essentials*. Swedish: Lulu. com. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=DiWGDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=NVivo+12+essentials.&ots=gd_EDDWmGU&sig=I_dSNQO3TOmaC7_9NAC-y0GB6ac&redir_esc=y#v=onepage&q=NVivo 12 essentials.&f=false.
- Ekawati, Esty. 2015. Koalisi Partai Islam Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014. *Jurnal Penelitian Politik* 12 (1):17–31.
- Ekawati, Esty. 2019. Peta Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Orde Baru. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7 (2):160. doi:10.31289/jppuma.v7i2.2680.
- Fanani, Ahmad Fuad. 2013. Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk Dalam Kegagalan Atau Menjawab Tantangan? *Maarif: Arus Pemikiran Islam Dan Sosial* 8:72–95.
- Fanani, Ahmad Fuad. 2014. Dilema Partai Politik Islam: Terpuruk Dalam Kegagalan Atau Menjawab Tantangan? *Maarif Institute* 8 (2):72–95.
- Fossati, Diego. 2019. The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 38 (2):119–148. doi:https://doi.org/10.1177/1868103419868400.
- Guardado, Jenny, and Leonard Wantchekon. 2018. Do Electoral Handouts Affect Voting Behavior? *Electoral Studies* 53. Elsevier:139–149.

- doi:<https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.11.002>.
- Hadiz, Vedi R. 2011. Indonesian Political Islam: Capitalist Development and the Legacies of the Cold War. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 30 (1):3–38. doi:10.1177/186810341103000101.
- Henderson, J Vernon, and Ari Kuncoro. 2011. Corruption and Local Democratization in Indonesia: The Role of Islamic Parties. *Journal of Development Economics* 94 (2):164–180. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jdevec.2010.01.007>.
- Jung, Eunsook. 2014. Islamic Organizations and Electoral Politics in Indonesia: The Case of Muhammadiyah. *South East Asia Research* 22 (1). SAGE Publications Ltd:73–86. doi:10.5367/sear.2014.0192.
- Kersten, Carol. 2017. *History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity*. Edinburgh University Press.
- KPU RI. 2023. Partai Politik 2004-2019. *Kpu.Go.Id*.
- Künkler, Mirjam, and Alfred Stepan. 2013. *Democracy and Islam in Indonesia*. Vol. 13. Columbia University Press.
- Latief, Hilman. 2013. The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-Based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 51 (2):337–363. doi:<https://doi.org/10.14421/ajis.2013.512.337-363>.
- Liddle, R William, and Saiful Mujani. 2013. 2. Indonesian Democracy. In *Democracy and Islam in Indonesia*, 24–50. Columbia University Press.
- Mair, Peter. 2008. Political Parties and Party Systems BT. In *Europeanization: New Research Agendas*, ed. Paolo Graziano and Maarten P Vink, 154–166. London: Palgrave Macmillan UK. doi:10.1057/9780230584525_12.
- Menchik, Jeremy. 2016. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. doi:10.1017/CBO9781316344446.
- Metz, Rudolf, and Réka Várnagy. 2021. “Mass,” “Movement,” “Personal,” or “Cartel” Party? Fidesz’s Hybrid Organisational Strategy. *Politics and Governance* 9 (4):317–328. doi:<https://doi.org/10.17645/pag.v9i4.4416>.
- Mietzner, M. 2013. Fighting the Hellhounds: Pro-Democracy Activists and Party Politics in Post-Suharto Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*. Taylor & Francis. doi:<https://doi.org/10.1080/00472336.2012.735919>.
- Mietzner, Marcus. 2016. Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi’s Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*. JSTOR, 209–232.
- Miichi, Ken. 2015. Democratization and ‘Failure’ of Islamic Parties in Indonesia. *Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization*. Springer, 127–144. doi:https://doi.org/10.1057/9781137436818_7.
- Mikail, Kiki. 2015. Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam Di Tahun 2019. *Tamaddun* 15 (1):107–148.
- Mujani, Saiful, R William Liddle, and Kuskridho Ambardi. 2018. *Voting Behavior in Indonesia since Democratization: Critical Democrats*. Cambridge University Press.
- Musella, Fortunato. 2018. *Political Leaders beyond Party Politics*. Springer.
- Musella, Fortunato, and Fortunato Musella. 2018. The Iron Law of Leadership: Ideology and Party Organization. *Political Leaders Beyond Party Politics*. Springer, 65–94. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-59348-7_3.
- Noor, Firman. 2016. Islamic Party and Pluralism: The View and Attitude of Masyumi towards Pluralism in Politics (1945-1960). *Al-Jami'ah* 54 (2):273–310. doi:10.14421/ajis.2016.542.273-310.
- Pepinsky, T B, R W Liddle, and S Mujani. 2012. Testing Islam’s Political Advantage: Evidence from Indonesia. *American Journal of Political Science* 56 (3). Cornell University, 322 White Hall,

- Ithaca, NY 14853, United States:584–600. doi:10.1111/j.1540-5907.2011.00570.x.
- Porter, Donald. 2004. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. Routledge.
- Rane, H. 2013. The Relevance of a Maqasid Approach for Political Islam Post Arab Revolutions. *Journal of Law and Religion* 28 (2). Griffith Islamic Research Unit, United States:489–520. doi:10.1017/S0748081400000126.
- Romano, Angela. 2013. *Politics and the Press in Indonesia: Understanding an Evolving Political Culture*. Routledge.
- Sakai, M, and A Fauzia. 2014. Islamic Orientations in Contemporary Indonesia: Islamism on the Rise? *Asian Ethnicity* 15 (1). School of Humanities and Social Sciences, The University of New South Wales Canberra, Australia:41–61. doi:10.1080/14631369.2013.784513.
- Saputro, Roman Hadi, Teguh Anggoro, Shohib Muslim, Iwan Usma Wardani, Endang Fatmawati, Muhammad Yusuf, Dwi Prasetyo, and Mochamad Aris Yusuf. 2023. Gaining Millennial and Generation Z Vote: Social Media Optimization by Islamic Political Parties. *Res Militaris* 13 (1):323–336.
- Tanuwidjaja, Sunny. 2010. Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the Evidence of Islam's Political Decline. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* 32 (1). ISEAS–Yusof Ishak Institute:29–49. <https://muse.jhu.edu/pub/70/article/380023/summary>.
- Triono, Triono. 2015. Faktor-Faktor Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam Pada Pemilu 2014. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11 (1):89–102. doi:<https://doi.org/10.24042/tps.v11i1.843>.
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah. 2016. A Genealogy of Moderate Islam: Governmentality and Discourses of Islam in Indonesia's Foreign Policy. *Studia Islamika* 23 (3).
- Van Bruinessen, Martin. 2013. *Overview of Muslim Organizations, Associations and Movements in Indonesia. Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*, Singapore: ISEAS.
- Waluyo, Andyala. 2014. MUI Dan FUI Desak Partai Islam Berkoalisi Untuk Munculkan Figur Capres Islam. *Voaindonesia.Com*.
- Waluyo, Tri Joko. 2021. The Changing Political Orientation of Air Tiris, Kampar, Riau Community towards Islamic Political Parties in General Elections (a Case Study: General Elections in Indonesia). *Journal of Islamic Marketing* 12 (2). Emerald Publishing Limited:225–248. doi:<https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2019-0118>.
- Yumitro, Gonda. 2014. Partai Islam Dalam Dinamika Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 17 (1):35–50.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2008. The Rise of Islamic Religious-Political Movements in Indonesia: The Background, Present Situation and Future. *Journal of Indonesian Islam* 2 (2):336–378. doi:10.15642/jiis.2008.2.2.336-378.
- Zulifan, Muhammad. 2019. Politik Islam Di Indonesia: Ideologi, Transformasi Dan Prospek Dalam Proses Politik Terkini. *Politik Indonesia Indonesian Political Science Review* 8 (2):59–71. doi:10.31289/perspektif.v8i2.2606.